



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : S. RIYADI
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 73803

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.400.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/247 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.139.500.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1416 m2/400 m2 di WONOGIRI, WARISAN Rp. 904.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 236.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS TYPE G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 66.209.815



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.736.709.815
III. HUTANG	Rp.	44.729.308
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.691.980.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.